

**KRISIS KEMANUSIAAN ROHINGYA DI MYANMAR DAN
PENGARUHNYA TERHADAP NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA
(ASEAN)**

MAKALAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Ujian Akhir Semester Lembaga-Lembaga
Internasional

Dosen Pengampu: Dr. Ija Suntana, M.Ag.



Disusun Oleh:

Astri Apriani

1193030015

SEMESTER VI

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI

BANDUNG

2022/1443 H

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada penulis nikmat yang begitu banyak, yang dengan nikmat itu penulis mampu menjalankan segala bentuk amanah yang diberikan sebagai khalifatullah dibumi. Shalawat dan salam senantiasa penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW., Yang mana penulis sebagai penyusun dapat menyelesaikan tugas, selaku Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dalam mata kuliah “Lembaga-Lembaga Internasional”

Materi pada makalah ini adalah “Lembaga-Lembaga Internasional”. Dengan adanya makalah ini penulis harapkan mampu untuk lebih mengetahui tentang pengaruh krirs kemanusiaan Rohingya di Myanmar terhadap negara-negara ASEAN. Penulis mengucapkan terimakasih pada bapak Dr. Ija Suntana, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik mata kuliah Lembaga-Lembaga Internasional sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang penulis tekuni.

Dengan demikian, akhir kata penulis sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses pembuatan makalah ini. Penulis menyadri masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam makalah ini, maka penulis sangat mengharapkan adanya kritik besertasaran yang mmbangun guna sempurnanya makalah ini.

Tasikmlaya, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah.....	5
BAB II PEMBAHASAN.....	6
A. Konflik antara Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine	6
B. Pengaruh Krisis Kemanusiaan Rohingya terhadap Stabilitas Keamanan Negara-Negara di Asia Tenggara (ASEAN).....	8
BAB III PENUTUP.....	12
A. Kesimpulan	12
DAFTAR PUSTAKA	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki abad ke-21, krisis dalam konteks kemanusiaan masih menjadi permasalahan yang masih sering terjadi hingga saat ini. Krisis kemanusiaan dapat dipahami dengan suatu keadaan dimana adanya hak-hak individu yang dilanggar, dicerai dan tidak terpenuhi. Beberapa hak yang termaktub seperti hak untuk memperoleh hidup, hak memperoleh keadilan berdasarkan kebutuhannya, memperoleh rasa aman, hak berpendapat, hak beragama, dan hak-hak dasar lainnya. Terdapat banyak penyebab dari krisis, salah satunya yakni adanya rasa tidak terima terhadap perbedaan yang ada disekitar. Baik itu dalam segi ras, etnis, suku, agama, warna kulit, dan masih banyak lagi. Sehingga terjadi perselisihan yang terjadi, baik itu antar individu, antar kelompok kecil maupun antar kelompok dalam jumlah besar.

Adanya konflik akibat perselisihan biasanya tak luput dari kurangnya perhatian pemerintah di daerah tersebut, atau memang tidak ada kemauan yang kuat dari otoritas setempat guna mendapatkan dan mencari jalan keluar terhadap pihak-pihak yang berselisih. Dampak buruknya yakni, adanya konflik biasanya memakan korban, sebab perselisihan yang tidak dapat dicegah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu berperan aktif guna mencari jalan keluar dalam konflik tersebut, sehingga dapat terhindar dari jatuhnya korban. Salah satu konflik kemanusiaan yang terjadi yakni yang terdapat di Myanmar, lebih tepatnya karena adanya diskriminasi terhadap salah satu etnis, yakni Rohingya.

Perlu diketahui, Myanmar dikenal dengan negara yang memiliki banyak etnis. Biasanya problematika yang sering terjadi yakni adanya kaum atau etnis 'mayoritas' dan 'minoritas'. Contoh nyata di Myanmar yakni konflik antara etnis Rakhine dan etnis Rohingya, kedua etnis tersebut telah lama berkonflik berkonflik pada satu daerah yang sama. Etnis Rohingya yakni etnis minoritas yang beragama

muslim, sedangkan etnis Rakhine merupakan etnis mayoritas yang berkeyakinan Buddha.

Dampak dari adanya krisis kemanusiaan yang terjadi pada etnis Rohingya, menjadikan mereka ingin pergi dari negaranya Myanmar dan pergi untuk mengungsi ke negara lain. Mengingat krisis kemanusiaan yang telah lama terjadi menimpa etnis Rohingya, sehingga negara-negara lain menjadi tujuan mereka untuk mengungsi guna setidaknya mendapatkan rasa aman dari diskriminasi yang terjadi di negaranya. . Termasuk mengungsi ke negara-negara Asia Tenggara yang menjadi tujuan mereka untuk mengungsi sebab berdekatan dengan negaranya sendiri, contohnya seperti negara Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Dengan demikian, penulis ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai **“Krisis Kemanusiaan Rohingya di Myanmar Dan Pengaruhnya Terhadap Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada pemaparan yang telah dijelaskan diatas, demikian penulis tertarik untuk mengulas lebih lanjut terkait masalah diskriminasi etnis yang berkaitan juga dengan krisis kemanusiaan, demikian rumusan masalahnya:

1. Bagaimana konflik kemanusiaan antara Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine?
2. Bagaimana pengaruh krisis kemanusiaan Rohingya terhadap stabilitas keamanan negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN)?

C. Tujuan Masalah

1. Mengetahui konflik kemanusiaan antara Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine
2. Mengetahui pengaruh krisis kemanusiaan Rohingya terhadap stabilitas keamanan negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN)

BAB II

PEMBAHASAN

A. Konflik antara Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine

Hingga saat ini, masih sering ditemukan diskriminasi yang terjadi, khususnya dalam lingkup Asia Tenggara. Secara garis besarnya, konflik yang terjadi di Myanmar dipahami bahwasanya ada diskriminasi, salah satunya berkaitan dengan umat beragama, terutama dalam konteks ini yakni agama muslim. Sebagaimana dijelaskan dalam jurnal yang berjudul “*Multidimensional Social Crisis and Religious Violence in Southeast Asia: Regional Strategic Agenda, Weak Civilian Government, Triune Crime, Wealth Gaps, and Coopted Journalism*.” dijelaskan dalam salah satu pembahasannya yakni : *The phenomenon of Islamophobia that can be observed in Southeast Asia in particular and in Asia, in general, is the incidence of torture of the Muslim Rohingya in Burma by Buddhist fanatics inspired by Buddhist monks of extremists and Muslim persecution by the Sri Lankan nationalist group Buddha.*¹ *Tensions ethnic tensions and religion will still affect the political dynamics in the countries of the region.*² Yang apabila diterjemahkan artinya Fenomena Islamofobia yang dapat diamati di Asia Tenggara pada khususnya dan di Asia pada umumnya adalah terjadinya penyiksaan terhadap Muslim Rohingya di Burma oleh para penganut Buddha fanatik yang diilhami oleh biksu Buddha dari para ekstremis dan penganiayaan Muslim oleh kelompok nasionalis Sri Lanka Buddha. Sebab konflik yang berkaitan dengan etnis serta agama akan terus selalu mempengaruhi dinamika politik di negara-negara Kawasan. Termasuk pada konteks ini negara Myanmar sebab masih dalam lingkup kawasan Asia Tenggara.

¹ Hafez, F. Unwanted Identities: The “Religion Line” and Global Islamophobia. *Development*, 2020. 63(1), 9. lihat dari Suntana, I. & Tresnawaty, B. (2021). *Multidimensional Social Crisis and Religious Violence in Southeast Asia: Regional Strategic Agenda, Weak Civilian Government, Triune Crime, Wealth Gaps, and Coopted Journalism*. *Journal of Culture and Values in Education*, 4(2). Hal. 3.

² Suntana, I. & Tresnawaty, B. (2021). *Multidimensional Social Crisis and Religious Violence in Southeast Asia: Regional Strategic Agenda, Weak Civilian Government, Triune Crime, Wealth Gaps, and Coopted Journalism*. *Journal of Culture and Values in Education*, 4(2). Hal. 5

Sejak tahun 2012, Myanmar telah menetapkan status darurat militer. Lalu otoritas Myanmar telah mengirimkan pasukan dengan bersenjata berat Ke daerah Rakhine guna menyelesaikan konflik yang terjadi. Tetapi pada kenyataannya, kedatangan pasukan ini justru membawa dampak buruk, dal ini dijelaskan oleh Human Right Watch atau disingkat dengan HRW. Pasalnya, pasukan yang dikirim Ke daerah Rakhine terbukti mencurkan banyak tembakan kepada orang Muslim Rohingya, sebab dikenal sebagai imigran gelap Bangladesh. Adapun laporan lengkapnya yang diterangkan oleh HRW, yakni HRW menegaskan bahwasanya aparat keamanan dari Myanmar terlibat dengan beberapa aksi, diantaranya pemerkosaan, pembunuhan serta penangkapan massal terhadap warga Rohingya yang mayoritas Muslim itu. Aksi-aski tersebut dilakukan pada saat kerusuhan sedang berlangsung. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya etnis Rohingya telah mengalami berbagai macam kekerasan, ketidakadilan berpuluh tahun lamanya, hal tersebut jelas sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), sebab banyak hak-hak asasi mereka yang dilanggar, dicerderai dan tidak terpenuhi.

Konflik yang terjadi di Rakhine merupakan konflik antar etnis yang melibatkan etnis Rakhine dan etnis Rohingya. Konflik yang terjadi berupa adanya ketidakadilan dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya, sebab etnis Rohingya disana menjadi kaum minoritas. Tindakan tersebut di lakukan oleh juunta militer dengan para biksu dari Rakhine serat dibantu juga oleh penduduk asli dari etnis Rakhine. Ditinjau dari factor structural yakni negara yang lemah geografi etnisnya, Perkembangan demografi penduduk antara Rakhine dan Rohingya dipengaruhi oleh kondisi geografis Rakhine State, dan oleh pemilihan perbatasan oleh pendudukan kolonial Inggris tanpa melihat atau memperhatikan logika etnis dan keamanan nasional yang lemah.

Lanjut dalam faktorr politik antara elitt, adanya kebijakan Burmanisasi yang dilaksanakan oleh junnta militer dengan cara mengambil tanah dengan cara dipaksa dari beberapa warga Rohingya. Tanah tersebut direbut bertujuan untuk pembangunan model village, mereka menempati etnis Rakhine dan orang-orang yang berkeyakinan Buddha di daerah mayoritas. Junta militerpun melakukan diskriminasi yang diarahkan kepada muslim Rohingya dengan cara mematikan

aktivitas politik dari Muslim Rohingya. Adapun diskriminasi dalam ranah ekonomi yakni etnis Rohingya tidak diberikan kepercayaan untuk mengelola perekonomian. Berbeda dengan etnis Rakhine yang diberikan kepercayaan serta kesempatan untuk mengelola perekonomian, dengan cara memberikan akses yang banyak terhadap perekonomian untuk kemudian dikelola oleh Etnis Rakhine.

B. Pengaruh Krisis Kemanusiaan Rohingya terhadap Stabilitas Keamanan Negara-Negara di Asia Tenggara (ASEAN)

Berbicara mengenai perkara ini, memang bukan perkara mudah. Pasalnya apabila dipahami lebih lanjut, krisis kemanusiaan yang dialami oleh Rohingya ini cukup rumit, sebab dari otoritas myanmarnya sendiri seperti kurang serius dalam upaya mencari solusi. Krisis kemanusiaan yang terjadi jelas sudah mencederai Hak Asasi Manusia, dan kini sudah menjadi perhatian internasional. mengingat etnis Rohingya pun sudah menyebar di beberapa negara lain, terkhusus untuk Kawasan Asia Tenggara. Dan tentunya hal ini akan memberikan pengaruh bagi negara-negara sekitarnya, termasuk ASEAN. Mungkin pengaruhnya tidak dapat dirasakan secara langsung, namun melihat problematikanya yang tak kunjung usai, maka perlu adanya upaya serius guna menyelesaikan semua permasalahannya.

ASEAN dipahami dengan suatu perkumpulan atau organisasi dari negara-negara yang berada disatu Kawasan yakni Asia Tenggara. Dalam organisasi ASEAN terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai keamanan. Perkara mengenai kemanan ini menjadi tujuan terutama ketika sedang terjadi konflik yang terjadi di Asia Tenggara. Dalam upaya merealisasikan peraturan tersebut, terdapat komunitas keamanan dari ASEAN yakni dikenal dengan ASC, atau kepanjangannya yakni *ASEAN Security Community*. Dalam hal ini, dengan adanya konflik yang terjadi di Myanmar merupakan suatu perkara atau tantangan yang perlu diatasi dan diselesaikan oleh ASC, sebab ini berkaitan dengan keamanan di Asia Tenggara. ASC harus mampu mengatasi guna kestabilan keamanan di Asia tenggara, supaya konflik ini tidak mengganggu keamanan, pun segala urusan yang

menyangkut dengan Asia tenggara, supaya aktivitas kenegaraan tetap dapat berlangsung dengan baik dan aman.³

Krisis yang terdapat di Myanmar menimbulkan beberapa pelanggaran HAM. Diantaranya seperti adanya diskriminasi, penganiayaan, kekerasan serta pelanggaran secara sistematis dan massif terhadap etnis Rohingya. Dampak dari krisis kemanusiaan ini tidak hanya berdampak kepada Myanmar, namun berdampak juga kepada negara-negara tetangga Myanmar, terkhusus dalam konteks Kawasan Asia Tenggara. Konflik ini menjadi masalah bagi ASEAN juga sebab ini mengancam kerusakan standar Hak Asasi Manusia yang terancam, merusak harkat dan martabat warga ASEAN sebab hal tersebut mengganggu stabilitas keamanan di Kawasan Asia Tenggara. tentunya ASEAN tidak akan berdiam saja melihat konflik ini, tentu mereka akan mencari berbagai macam upaya untuk mencari solusi dari konflik ini. Para etnis Rohingya yang keluar dari negaranya dan ingin mengungsi tentunya akan mencari negara-negara yang berdekatan dengan negaranya, sehingga hal ini tidak bisa dianggap sepele dan perlu adanya perhatian serius. Mengingat hal yang penting dari ASEAN yakni guna melahirkan lingkungan yang aman, tentram serta stabil. Pernyataan tersebut terdapat pada piagam ASEAN poin kedua, yakni berbunyi “Untuk memelihara perdamaian dan stabilitas regional dengan mentaati keadilan, tata hukum dalam hubungan antara bangsa-bangsa Asia Tenggara serta berpegang teguh pada azas-azas piagam PBB”.⁴

Komunitas dari keamanan ASEAN memiliki sifat yang terbuka, Didasari dari kebijakan keamanan yang komprehensif, tidak ditujukan untuk membentuk fakta pertahanan atau aliansi militer, juga tidak ditujukan untuk kebijakan luar negeri bersama. Demikian maksudnya yakni dalam upaya yang akan dilakukan, akan tetap menjaga stabilitas kondisi keamanan di kawasan Asia Tenggara. Para pemimpin bangsa erta Negara anggota dari ASEAN mengambil kebijakan berdasarkan

³Riana Mardila. 2020. “Rohingya’s In Search For Security: An Introduction To Human Security Concept Through Rohingya’ Lens.” Jurnal Ilmu Sosial Indonesia.

⁴ Susanto, Normawati. 2019. “Pengaruh Konflik Pemerintah Sipil Dan Militer Myanmar Terhadap Kebijakan Myanmar Dalam Penanganan Kasus Rohingya Tahun 2015-2019.” Journal of International Relations

percepatan implementasi Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN promosi dan perlindungan HAM.

Kebijakan yang dibuat oleh ASEAN dalam rangka mengambil Tindakan dalam menangani konflik kemanusiaan di Myanmar berdasarkan pada keputusan yang diperoleh dengan tetap memperhatikan peraturan-peraturan dengan kesamaan nilai dan norma. Banyak orang Rohingya telah dibawa atau diculik karena pihak dari otoritas yang berwenang memata-matai gerak langkah mereka dengan sangat ketat. Tak sedikit populasi Muslim terpaksa bermigrasi karena alasan keamanan. Memang pada dasarnya mereka hanya membutuhkan rasa aman, maka mereka berani untuk meninggalkan negara asalnya. Terhitung lebih dari 200.000 warga Rohingya melarikan diri sebab adanya berbagai bentuk kekerasan. Akibatnya, salah satu negara Asia Tenggara bergerak cepat untuk memberikan keamanan bagi negara mereka, sementara pemerintahan dari Thailand menyatakan tak siap dalam menerima kunjungan atau pengungsi dari Rohingya ini, karena satu dan lain hal. Artinya terdapat kesulitan serta ketidaksiapan negara guna menstabilkan kewajiban kemanusiaannya. Kekhawatiran itu berkaitan dengan urusan keamanan perbatasan.

Sementara itu, di Indonesia pun termasuk menjadi salah satu tempat yang menjadi tujuan pendaratan pengungsi dari Rohingya. Sebelum adanya perintah dari Jusuf Kalla untuk menampung para pengungsi, aparat keamanan laut Indonesia pun mendorong kembali ke laut perahu-perahu pengungsi yang tidak terdampar di Indonesia setelah dibantu pasokan pangan. Jusuf Kalla berpendapat, Indonesia bersedia untuk terima kedatangan pengungsi dengan adanya alasan utama yakni kemanusiaan. Indonesia akan memberikan upaya untuk menyatukan keluarga yang terpisah. Bagi anak-anak yang kehilangan keluarganya, mereka akan ditempatkan ditempat khusus anak-anak atau dapat dikatakan seumpama panti dan pondok pesantren di Indonesia. Tetapi, pemerintah telah berlakukan syarat bahwa Indonesia hanya dapat menampung pengungsi dalam kurun waktu selama setahun saja. Setelah masa waktu habis, diusahakan untuk dipulangkan ke negara asal atau diterima di negara tujuan lain. Indonesia membuat kebijakan seperti itu, tentu beserta alasannya. Perlu diketahui pula bahwasanya pengungsi dari Rohingya ini memiliki jumlah yang tidak sedikit, artinya hal ini menjadi PR besar bagi negara-

negara yang dikunjungi untuk kemudian menjadi tempat tinggal bagi Rohingya, termasuk Indonesia. Sebab tidak hanya menyediakan tempat untuk tinggal, namun hal lain yang perlu diperhatikan yakni kebutuhan lainnya. Seperti sandangmya, serta pangannya. Tentu hal ini membutuhkan pengeluaran yang cukup besar pula.

Apabila ditinjau lebih lanjut, ASEAN merupakan lembaga yang paling baik dan cocok guna menyelesaikan konflik dan krisis tersebut, sebab letak geografis Myanmar sendiri berada di kawasan Asia Tenggara, dan konflik ini secara langsung mempengaruhi keamanan dan stabilitas Kawasan Asia Tenggara, terutama bagi negara tetangga Myanmar yang berada pada satu Kawasan Asia yang sama. Tidak salah apabila banyak pihak yang mengharapkan ASEAN sebagai organisasi kawasan untuk menyelesaikan krisis dalam proses mencapai keamanan dan stabilitas, sebab untuk tercapainya negara yang stabil dibutuhkan kawasan yang stabil juga. Maka dengan begitu akan adanya keselarasan diantara keduanya, sebab keduanya saling berkaitan..⁵

⁵ Sundari, Rio, Rendi Prayuda, and Dian Venita Sary. 2021. "Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan Di Myanmar." Jurnal Niara.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konflik yang melibatkan Rakhine dan Rohingya di Provinsi Rakhine terutama disebabkan oleh tindakan diskriminatif terhadap biksu Rakhine oleh junta militer dengan bantuan warga Rakhine. Perlakuan diskriminatif terhadap Rohingya antara lain karena identitas mereka yang berbeda, karena mereka adalah minoritas. Tindakan tersebut dilakukan oleh nunta militer dengan para biksu Rakhine serafat dibantu juga oleh penduduk asli dari etnis Rakhine. Ditinjau dari factor structural yakni negara yang lemah geografi etnisnya, perkembangan demografi penduduk antara Rakhine dan Rohingya dipengaruhi oleh kondisi geografis Rakhine State, dan oleh pemilihan perbatasan oleh pendudukan kolonial Inggris tanpa melihat atau memperhatikan logika etnis dan keamanan nasional yang lemah. Hal tersebut merupakan beberapa factor pendukung konflik yang dialami kedua etnis tersebut.

Krisis yang terjadi di Myanmar, termasuk penganiayaan terhadap Rohingya, kekerasan dan agresi sistematis, dan masuknya pengungsi akibat adanya konflik, merupakan masalah tidak sebatas untuk Myanmar saja, tetapi juga bagi negara di Asia Tenggara atau ASEAN secara keseluruhan. Bentuk beberapa kejahatan ini berpotensi merusak standar hak asasi manusia dan martabat warga negara ASEAN karena merusak keamanan dan stabilitas negara. Konflik yang memicu arus pengungsi, jika tidak ditanggapi dengan serius, akan merusak keamanan dan stabilitas. Diharapkan adanya perhatian yang serius guna mengatasi problematika yang sedang terjadi ini, sebab ini kaitannya dengan konteks jaminan keamanan yang dapat dirasakan oleh semua negara yang berada dalam lingkup Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Hafez, F. (2020). *Unwanted Identities: The “Religion Line” and Global Islamophobia. Development.* 63(1), Hal. 9.
- Mardila, Riana. (2020). “*Rohingya’s In Search For Security: An Introduction To Human Security Concept Through Rohingya’ Lens.*” *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia.*
- Sundari, Rio, Prayuda, P, dan Sary, Dian Venita. (2021). “*Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan Di Myanmar.*” *Jurnal Niara*
- Susanto, Normawati. (2019). “*Pengaruh Konflik Pemerintah Sipil Dan Militer Myanmar Terhadap Kebijakan Myanmar Dalam Penanganan Kasus Rohingya Tahun 2015-2019.*” *Journal of International Relations*
- Suntana, I. & Tresnawaty, B. (2021). *Multidimensional Social Crisis and Religious Violence in Southeast Asia: Regional Strategic Agenda, Weak Civilian Government, Triune Crime, Wealth Gaps, and Coopted Journalism.* *Journal of Culture and Values in Education*, 4(2). Hal. 3
<https://doi.org/10.46303/jcve.2021.2>
- Tue Mali, Fransiskus X. Gian. (2017). “*Peluang Asean Community Menyelesaikan Masalah Rohingya.*” *Jurnal Asia Pacific Studies.*